



Dampak Kekerasan Seksual di Pesantren Shiddiqiyah dan Upaya Korban Untuk Melawan Kekerasan Seksual

Siamrotul Ayu Masruroh (Front Santri Melawan Kekerasan Seksual)
ayumasruroh1902@gmail.com

Abstrak:

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh Muhammad Subchi Azal Tsani (Bechi), seorang anak kiai terhadap santri di pesantren Shiddiqiyah Jombang memiliki dampak yang sangat kompleks, mencakup aspek pendidikan, sosial, ekonomi, dan psikologis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan melakukan wawancara mendalam dengan para korban kekerasan seksual. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul terkait dampak kekerasan seksual. Dalam menghadapi tantangan ini, para korban saling mendukung dan membentuk sebuah organisasi bernama Front Santri Melawan Kekerasan Seksual (FORMUJERES) untuk terlibat dalam upaya pencegahan dan advokasi terhadap kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Selain itu, para korban berupaya menata ulang kehidupan mereka dengan melanjutkan pendidikan dan membangun usaha guna memperoleh penghasilan yang mandiri.

Kata Kunci: *Kekerasan Seksual, Pesantren, Upaya Korban, Pencegahan dan Advokasi*

Pendahuluan

Kekerasan seksual kepada santri yang dilakukan oleh Muhammad Subchi Azal Tsani (Bechi) putra kiai Pondok Pesantren Shiddiqiyah adalah kekerasan seksual yang sistemik dan terstruktur. Identifikasi tersebut diketahui bahwa putra kiai ini telah memanipulasi dan membayar anak di bawah umur untuk menjadi budak seksual dalam kurun waktu bertahun-tahun. Bechi memiliki tempat khusus untuk melakukan kekerasan seksual yang letaknya jauh dari permukiman warga sehingga tak bisa dijangkau sembarang orang. Bechi memiliki sejumlah bantuan untuk melancarkan berbagai aksi kekerasan serta membungkam para korban agar diam. Bechi memiliki para ajudan yang dibekali air gun (jenis pistol berbahaya) dan drone untuk mengamankan situasi. Bechi juga dilindungi oleh otoritas dan jamaah pesantren Shiddiqiyah yang sangat fanatik.

Bechi sebagai anak kiai dari pesantren tradisional terkenal di Jombang, mempunyai pengaruh ekonomi yang besar. Selain memiliki Hotel Yusro, jejaring bisnis Pesantren Shiddiqiyah meliputi pabrik sigaret Sehat Tentrem,



minuman kemasan MAAQO, properti, poliklinik, percetakan, koperasi, rumah makan dan kafe, hingga mempunyai program kegiatan santunan dan pembangunan rumah layak huni. Tak hanya itu, beberapa elit politik pernah datang ke pesantren untuk sowan ke ayahnya, Kiai Muchtar Mu'thi, pimpinan Pondok Pesantren Shiddiqiyah. Di antaranya Presiden Joko Widodo, Prabowo Subianto, Luhut Pandjaitan, dan Muhadjir Effendy dan banyak para kepala daerah melakukan kunjungan ke pesantren milik ayahnya.

Dengan beragam kekuatan dan keistimewaan yang dimilikinya, Bechi telah melakukan berbagai cara untuk menutupi kasus kekerasan seksual yang dilakukannya. Pada saat Bechi ditetapkan dalam Dalam Pencarian Orang (DPO), institusi pesantren melindungi dan menghalang-halangi polisi untuk menangkap Bechi selama berbulan-bulan. Pada puncaknya pada tanggal 7 Juli 2022, ribuan jemaah Shiddiqiyah membentuk barisan manusia di depan gerbang pesantren untuk menghalangi polisi melakukan penangkapan Bechi. Menjelang persidangan kasus kekerasan seksual yang dilakukan Bechi, beberapa keluarga korban menerima surat intimidasi dari Kiai Muchtar. Otoritas Shiddiqiyah juga mendatangi beberapa keluarga saksi dan korban untuk meminta agar tidak memberikan keterangan yang memberatkan Bechi. Bechi juga menyiapkan beberapa saksi palsu untuk menyangkal para saksi dan korban. Dalam persidangan, bahkan bangunan tempat kejadian perkara pun dirombak bentuknya oleh pihak Bechi untuk kepentingan kejahatannya.

Pada 17 November 2022, Bechi secara sah diputus bersalah telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual (perkosaan) kepada santrinya oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan mendapat hukuman tujuh (7) tahun penjara karena melanggar pasal 289 KUHP juncto pasal 65 ayat 1 KUHP dan UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pada saat itu ribuan jemaah pesantren tidak terima atas putusan Bechi. Mereka sempat bentrok di Pengadilan Negeri Surabaya, kemudian mereka mengambil langkah hukum banding di pengadilan Tinggi Jawa Timur. Putusannya tetap saja Bechi mendapat hukuman tujuh tahun penjara, dan kemudian ia melakukan kasasi di Mahkamah Agung dan putusannya Bechi ditetapkan dihukum selama tujuh tahun penjara. Meskipun kekerasan seksual bisa dibuktikan di pengadilan, pihak Shiddiqiyah sampai saat ini melakukan banyak intimidasi kepada para penyintas. Para jemaah masih saja menyalahkan korban yang ditujukan kepada para korban dan penyintas. Mereka membuat narasi kalau penyintas adalah tukang fitnah dan orang-orang yang menghancurkan pesantren.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam tak berstruktur kepada korban kekerasan seksual di pesantren Shiddiqiyah. Untuk memahami dinamika yang terjadi, penelitian ini mengacu pada teori kuasa dari Michel Foucault, di mana diskursus patriarki digunakan untuk menganalisis bagaimana norma gender dan dominasi laki-laki berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan seksual. Konsep patron-klien juga diadopsi untuk menggambarkan hubungan antara santri dan kiai dan resiliensi para korban menjadi fokus penting dalam penelitian ini. Data yang diperoleh melalui wawancara mendalam akan dianalisis dengan teknik triangulasi untuk memperkuat validitas hasil. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, meliputi pengumpulan data, reduksi data, penampilan data, dan penarikan kesimpulan. Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan memberikan wawasan mendalam tentang faktor-faktor yang berkontribusi pada kekerasan seksual di lingkungan pesantren, serta strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah ini.

Pembahasan

Dampak kekerasan seksual yang dilakukan oleh Muhammad Subchi Azal Tsani (Bechi) kepada santri yang menjadi korban di pesantren Shiddiqiyah sangatlah kompleks. Hal itu disebabkan karena kekerasan seksual yang terjadi di pesantren Shiddiqiyah tersebut adalah kekerasan seksual yang sistemik dan terstruktur.

Dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Bechi kepada korban pertama yang bernama Raisa (bukan nama asli), kekerasan seksual tersebut berlangsung pada tahun 2012-2017. Kejadian pertama Raisa dipaksa untuk membuka baju dan menerima uang sejumlah Rp. 500.000 pada saat usianya baru 14 tahun. Selanjutnya Raisa terus mendapatkan perlakuan yang sama secara berulang-ulang, apabila ia tidak mau melakukan hubungan seksual dengan Bechi, Raisa akan mendapat banyak kekerasan fisik, seperti dibanting, ditampar, diludahi, bahkan dipaksa

untuk berhubungan seksual dengan tiga orang sekaligus. Dalam pengakuannya, Raisa juga pernah beberapa kali disekap. Puncak dari kekerasan yang didapatkan Raisa, ia disekap dan kemudian ditahan di Kepolisian Sektor Ploso dan kemudian dia dipaksa untuk mengaku telah menyebarkan foto telanjang, setelah itu Raisa dikeluarkan dari pesantren pada Maret 2017.

Dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Bechi kepada korban kedua yang bernama Alina (bukan nama asli), terjadi pada tahun 2015. Setelah ia mengalami perkosaan, Bechi sebagai pelaku mengirimkan seorang laki-laki untuk menjalin relasi romantis dengan Alina, setelah itu Alina menikah dan mempunyai dua anak laki-laki dengan laki-laki yang dikirimkan oleh Bechi. Namun Alina tidak menyadari hal tersebut. Pada saat tahun 2018, para korban Bechi yang lain ingin mengungkapkan berbagai kekerasan seksual yang dialaminya. Pada saat itu, Alina ingin pula turut berjuang menuntut keadilan, namun yang terjadi pada saat itu Alina justru konflik dengan suaminya. Suaminya banyak melakukan kekerasan seperti menampar, mencekik, merobohkan motor ke tubuh Alina, dan bahkan mengancam akan membakar rumahnya. Pada saat yang sama, orang tua Alina juga tidak setuju dengan jalan yang akan ditempuh Alina untuk berjuang menuntut keadilan. Orang tua Alina merasa kalau Alina menuntut keadilan atas kekerasan seksual yang dilakukan oleh Bechi itu sama saja dengan mencemarkan nama baik pesantren, sehingga hal tersebut akan membuat orang tua Alina tidak mau mengakui Alina sebagai anaknya.

Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Bechi kepada korban ketiga yang bernama Nala (bukan nama asli). Kekerasan seksual yang dilakukan Bechi pada tahun 2017 terjadi dengan dalih menyampaikan ilmu metafakta untuk bekal menjadi relawan di klinik sehat tentrem medical center (RSTMC). Nala diminta oleh Bechi untuk melakukan personal interview pada sebuah ruangan khusus, kemudian Nala dimanipulasi bahwa Bechi mencintai Nala. Bechi mengaku bahwa dirinya bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa saksi dan tanpa wali. Nala dibuat merasa ketakutan hingga terjadilah tindak perkosaan.

Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Bechi kepada korban keempat yang bernama Sara (bukan nama asli). Apa yang dialami Sara tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh Nala. Sara mendapatkan kekerasan seksual yang dilakukan Bechi pada tahun 2017 dengan dalih menyampaikan ilmu metafakta untuk bekal menjadi relawan di klinik sehat tentrem medical center (RSTMC).

Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Bechi kepada korban kelima yang bernama Syifa (bukan nama asli). Korban ke lima tidak jauh berbeda dengan korban Nala dan Sara. Sara mendapatkan kekerasan seksual yang dilakukan Bechi pada tahun 2017 dengan dalih menyampaikan ilmu metafakta untuk bekal menjadi relawan di klinik sehat tentrem medical center (RSTMC). Yang berbeda ia diminta berendam menggunakan kain batik sidomukti kemudian ditelanjangi bersama dua temannya. Ritual berendam itu dijadikan alasan oleh Bechi sebagai metode pensucian diri sebelum memberikan ilmu metafakta. Dalam kasus Syifa, ia sebagai korban kekerasan seksual tidak dipercaya kesaksian dan pengakuannya. Ia bahkan tidak diakui anak oleh ayahnya, karena ayahnya fanatik dengan kiai dan ajaran pesantren Shiddiqiyah.

Berdasarkan pengakuan lima korban di atas, kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren Shiddiqiyah menjadi masalah yang serius. Hal tersebut bisa menyadarkan kepada banyak pihak bahwa adanya penyalahgunaan dan penyimpangan kuasa, di mana seseorang yang memiliki posisi dan kuasa yang lebih tinggi telah memaksakan kehendaknya pada orang lain yang posisinya dianggap lebih rendah. Relasi kuasa inilah yang membuka celah untuk melakukan tindakan yang tidak beradab atas dasar menuruti hasrat seksualnya. Relasi kuasa yang tidak seimbang menyebabkan kerentanan terjadinya kekerasan seksual di mana setelah kejadian kekerasan seksual yang dialami korban, korban cenderung mengalami ketakutan untuk melaporkan atau memproses lebih lanjut terhadap peristiwa yang dialaminya. Belum lagi dalam kasus kekerasan seksual yang ada di Shiddiqiyah tersebut, ada intimidasi dan ancaman dari pelaku yang merupakan tokoh agama. Hal ini menunjukkan adanya pembelaan dan bahkan penolakan dari pelaku seolah dirinya sedang mendapatkan kezaliman dengan dalih laporan pencemaran nama baik. Kasus diatas dapat kita cermati bahwa bagaimana cara relasi kuasa bekerja, bagaimana dampak yang akan ditimbulkan berbeda oleh relasi yang berbeda pula dan bagaimana tindakan yang dipilih untuk dilakukan oleh korban. Apabila pelaku kekerasan seksual memiliki posisi atau kuasa lebih tinggi, maka penyintas akan memilih untuk pasif, bingung, dan menghadapi kendala psikis maupun respons sosial atas kejadian tersebut.

Merujuk apa yang disampaikan oleh Christopher Kilmartin, (2001) dalam bukunya yang berjudul “Sexual Assault in Context: Teaching College Men about Gender” dijelaskan bahwa banyak kasus kekerasan seksual bukanlah hasil dari kesalahpahaman atau kekeliruan antara kedua belah pihak. Atau bukan juga karena unsur ketidaksengajaan, khilaf ataupun terjadi tiba-tiba, melainkan terjadi karena adanya unsur perencanaan dan hal tersebut dilakukan secara sadar oleh pelaku yang mempunyai kuasa, kesempatan, dan membaca situasi terkait korbannya. Bahkan pelaku juga mengetahui dan menganggap korban tidak akan menolak ataupun bercerita ke orang lain atas kejadian yang dialaminya. Pelaku tersebut juga tidak segan melontarkan ancaman ataupun intimidasi jika korban berniat melaporkan kejadian tersebut.

Lebih lanjut bagaimana kita dapat menyelami relasi kuasa yang dikemukakan oleh Michel Foucault sebagai suatu modus sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan seksual yang polanya semakin kompleks, seperti kejadian kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak kiai, pengasuh pondok peantren kepada santriwatinya sendiri. Karena itu penting bagi kita untuk mengetahui dalam bentuk apa, melalui jalur apa, dengan menyelip dalam wacana apa, kekuasaan berhasil melingkupi bentuk-bentuk yang paling halus dan paling pribadi dari perilaku seksual, dan melalui jalan mana kekuasaan berhasil mencapai berbagai bentuk birahi yang paling langka dan paling terselubung, serta bagaimana kekuasaan dapat merambah dan mengendalikan kenikmatan seksual itu (Foucault, 1997, hal. 12).

Untuk menjawab kegelisahan ini maka perlu diuraikan terkait keberadaan korban dan pelaku dalam kekerasan seksual. Adanya relasi kuasa dalam kasus kekerasan seksual merupakan salah satu unsur yang dipengaruhi oleh kekuasaan yang dimiliki pelaku atas ketidakberdayaan korban. Dari beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam ranah pendidikan seperti perguruan tinggi, pesantren, dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya, bukan tidak mungkin pelakunya tidak memiliki pengetahuan. Para pelaku melakukan perbuatan tindak pidana kekerasan seksual melalui relasi kuasanya lewat pengetahuan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Foucault “kekuasaan selalu teraktualisasi lewat pengetahuan, dan pengetahuan selalu mempunyai efek kuasa” (Foucault, 1980, hal. 1977). Dalam era modern seperti sekarang ini semua tempat berlangsungnya kekuasaan juga menjadi tempat pengetahuan. Dalam beberapa risetnya, Foucault banyak meneliti berbagai fenomena kegilaan yang kemudian berkembang menjadi keilmuan lainnya seperti psikiatri, psikologi, kedokteran, sosiologi, kriminologi, dan bahkan teologi. Semua pengetahuan memungkinkan terjadinya kekuasaan, kehendak untuk mengetahui menjadi proses dominasi terhadap objek-objek dan terhadap manusia. Melihat pandangan Foucault terkait dengan pengetahuan yang merupakan reduksi wacana yang terstruktur yang berada di alam pikiran kita dan secara halus menjadi paradigma kita dalam berfikir dan bertindak. Wacana ini kemudian hidup dan menjadi bagian dari diri kita yang mengatur tingkah laku kita dan membatasi gerak-gerik kita. Wacana inilah yang disebut Foucault sebagai suatu kebenaran yang dominan dalam sebuah struktur masyarakat (Eriyanto, 2003, hal. 77). Dalam praktiknya, wacana pengetahuan sering kali digunakan untuk melanggengkan kekuasaan.

Kekuasaan adalah suatu jaringan kelembagaan yang mendominasi dan berhubungan dengan relasi-relasi yang lainnya seperti dan kekeluargaan, yang memainkan peran pengondisian dan dikondisikan (Foucault, 2002, hal. 175). Kekuasaan sebagai sebuah konsep disatu sisi lain sangatlah berhubungan dengan agama. Terkadang keduanya menyatu dalam satu kesatuan dan tidak jarang menimbulkan benturan diantara keduanya. Agama menjadi satu topik yang akan diperbincangkan karena agama sangat mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku manusia (Priyanto, 2017, hal. 187). Sebagaimana yang sedang hangat diperbincangkan dikalangan umum, pondok pesantren yang sejatinya adalah tempat untuk menimba ilmu keagamaan tercoreng akibat ulah pengasuh/pengajar yang menyalahgunakan relasi kuasanya. Dari kasus tentang fenomena kekerasan seksual yang ada di rungan lingkup pendidikan agama seperti Shiddiqiyah, pelaku merupakan pihak yang secara utuh memiliki kuasa dalam suatu hubungan (guru–murid) sehingga ketika ada relasi maka di sana ada kekuasaan. Ketika kekuasaan itu disalahgunakan demi hasrat maka selama itu pula kekerasan dalam ruang lingkup pendidikan tinggi akan muncul kasus-kasus yang serupa.

Sistem patriarki adalah penyebab utama perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Berbicara mengenai sistem patriarki yang berlaku di masyarakat akan mengarah pada ketidaksetaraan gender. Sistem ini membuat

konstruksi bahwa kaum laki-laki berada pada posisi superior, sementara perempuan berada di posisi inferior. Konstruksi yang dibangun ini membuat perempuan tidak mendapat aksesibilitas atau menerima hak yang sama seperti laki-laki. Perempuan cenderung terdiskriminasi keberadaannya, oleh karena itu perempuan termasuk ke dalam kaum marginal. Marginalisasi pada perempuan bisa dilihat pada berbagai aspek kehidupan, misalnya ekonomi di mana pekerja perempuan tidak mendapat upah yang setara dengan laki-laki; Pendidikan, di mana masyarakat tidak terlalu menuntut perempuan untuk meraih pendidikan yang tinggi karena perempuan hanya akan bekerja di dapur dan mengurus rumah, dan sebagainya. Hal yang paling buruk dari pengimplementasian sistem patriarki adalah kekerasan terhadap perempuan. Patriarki yang menempatkan laki-laki pada posisi superior memberikan pandangan bahwa laki-laki adalah pihak yang berhak memimpin, menguasai, utamanya menguasai perempuan. Pandangan ini akhirnya mengakibatkan perempuan diperlakukan sewenang-wenang, yang akhirnya merugikan perempuan, baik dari segi fisik maupun psikologisnya. Bentuk perlakuan yang sewenang-wenang ini di antaranya adalah kekerasan seksual. Bentuk kekerasan seksual atau bentuk kekerasan lain yang dilakukan oleh Bechi sebagai laki-laki terhadap santri perempuan tak lain merupakan bentuk ekspresi maskulinitasnya dalam relasi atau interaksinya dengan perempuan. Berangkat dari sistem patriarki yang merupakan konstruksi sosial yang dibentuk oleh masyarakat yang menyebabkan kaum laki-laki memiliki privilege atas keputusannya dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk perlakuannya terhadap perempuan.

Dalam dunia pesantren, dikenal istilah *talmadzah* yang menggambarkan bagaimana sikap pasif santri ke guru terjadi karena pola pendidikan santri sebagai murid, abdi, dan kawula yang dijelaskan dalam kitab Ta'lim Muta'allim, sebagai referensi kitab kuning yang dipelajari di pesantren (Zakiah, 2015). Selain memiliki gaya kepemimpinan karismatik, posisi kiai sebagai penyambung ilmu di pesantren membuat mereka dihormati karena dianggap menguasai dan mengamalkan ilmu yang diajarkan, sehingga para santri merasa harus patuh apabila ingin mendapat berkah dari mereka. Posisi kiai sebagai patron bagi para santri menjadikan mereka melakukan tindakan sukarela dalam menjalankan perintah kiai.

Tradisi pesantren seperti yang disebutkan sebelumnya, menempatkan kiai sebagai patron dan orang yang selalu benar menguatkan fungsi tersebut. Oleh karena itu, untuk tetap mempertahankan posisi dan fungsi kiai dalam pesantrennya, tradisi tersebut harus tetap dipertahankan. Hubungan kiai-santri di pesantren yang bersifat patron klien yang menyebabkan adanya hierarki status dan ketergantungan santri pada kiai serta penghormatan santri terhadap kiai yang berlebih-lebihan menjurus kepada kultus individu (Nurhayati, 2000), menjadikan santri secara tidak langsung diharuskan untuk sepenuhnya percaya kepada kiai. Hal ini didukung dengan kenyataan yang ada, terutama dalam pesantren tradisional, bahwa kedudukan kitab kuning sangat penting. Kitab kuning adalah himpunan kodifikasi tata nilai yang dianut masyarakat pesantren sedangkan kiai dianggap sebagai personifikasi yang utuh dari sistem tata nilai itu.

Selain itu, Nurhayati (2000) menyatakan, ada keyakinan yang kukuh dalam masyarakat pesantren bahwa kitab kuning merupakan pedoman yang sah dan relevan. Sah dalam arti bersumber dari kitab dan sunnah Nabi serta relevan dalam arti tetap cocok untuk kehidupan di masa sekarang dan nanti. Kondisi tersebut dapat dikatakan sebagai salah bentuk usaha untuk menjaga kesakralan pesantren sebagai tempat untuk belajar ilmu agama Islam dengan jalan penerapan aturan dan nilai-nilai ajarannya secara ketat. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sztompka (1999) bahwa kesakralan tempat merupakan situasi yang sangat mendukung terbentuknya kepercayaan. Metode pembelajaran di pesantren tradisional di mana santri dan kiai belajar mengenai isi kitab dengan keyakinan bahwa isi kitab maupun kiai yang membawakan/mengajarkan kitab tersebut, keduanya adalah benar mendukung penguatan kepercayaan santri terhadap kiai. Dengan demikian sangat jelas bahwa tingkat kepercayaan santri terhadap kiai di pesantren cukup tinggi, terutama di pesantren tradisional yang memegang erat tradisi kitab kuningnya dengan kuat.

Seperti telah dijelaskan di atas, hubungan patron-klien antara kiai dan santri, menyebabkan adanya hierarki status dan ketergantungan santri pada kiai, penghormatan santri kepada kiai yang menjurus pada kultus individu. Hubungan ini didukung oleh kewibawaan kiai yang biasanya berasal dari silsilah yang terhubung sampai pada Muhammad SAW, dan adanya nilai yang dipegang teguh oleh santri bahwa mendebat kiai akan menyebabkan

kuwalat. Hal lain yang terjadi adalah tipe kepemimpinan di pesantren yang memberi penonjolan yang besar pada kiai menyebabkan adanya kepemimpinan unsur feodal yang dibungkus oleh baju keagamaan (Nurhayati, 2000). Demikian besar kekuasaan seorang kiai atas diri santrinya, sehingga si santri untuk seumur hidupnya akan senantiasa merasa terikat dengan kainya, minimal sebagai sumber inspirasi dan sebagai penunjang moral utama dalam kehidupan pribadinya. Patronasi kiai juga sangat terlihat di dalam sistem pendidikan di pesantren. Dalam metode pendidikan di pesantren, seorang santri yakin bahwa kiai tidak akan mengajarkan hal-hal yang salah dan kitab yang dipelajarinya juga diyakini benar (lihat Nurhayati, 2000).

Dampak hubungan patron klien antara kiai dan santri, bagi para korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Bechi yang paling mendasar adalah sulit untuk bisa berpikir logis dan kritis. Hal ini disebabkan karena para korban ini menempuh pendidikan selama belasan tahun di Pesantren Shiddiqiyah. Sejak kecil mereka dididik untuk menerima tanpa berpikir kritis tentang segala ajaran Shiddiqiyah yang feodal dan patriarki. Mereka mendapat doktrin bahwa pendidikan Shiddiqiyah adalah pendidikan yang paling baik dan benar dibandingkan dengan sistem pendidikan yang lain. Hal ini membuat mereka merasa besar dan paling bermanfaat dari pada yang lain. Pada kondisi tersebut, pada waktu itu para korban tidak memiliki cita-cita apapun, selain untuk bisa mengabdikan dan menghamba pada pesantren Shiddiqiyah. Ketika para korban mengalami kekerasan seksual, korban merasa kehilangan banyak hal dalam hidupnya.

Kondisi korban tindak pidana kekerasan seksual akan mengalami masa-masa sulit dan tekanan baik secara fisik maupun psikologis. Kemampuan untuk bangkit dan sembuh dari trauma atau kondisi yang menekan dalam psikologi biasa disebut dengan istilah resiliensi. Secara sederhana, resiliensi dapat didefinisikan sebagai kapasitas seseorang yang membuat mereka mampu bertahan dan tegar menghadapi banyak stressor (Bukhori, Hassan, Hadjar, & Hidavah, 2017). Kualitas resiliensi setiap orang tidaklah sama, karena kualitas resiliensi seseorang sangat ditentukan oleh tingkat usia, taraf perkembangan, intensitas seseorang dalam menghadapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan, serta seberapa besar dukungan sosial dalam pembentukan resiliensi pada diri seseorang (Grotberg, 1995). Resiliensi sendiri merupakan suatu keahlian (*skill*), kemampuan, pengetahuan, *insight* untuk berjuang, menghadapi kesulitan, dan menghadapi tantangan (Garmezy, 1993). Resiliensi adalah kemampuan yang dimiliki setiap individu dan bersifat dinamis untuk bangkit dan mampu beradaptasi ke arah positif atau menunjukkan suatu perkembangan dalam situasi sulit, kondisi yang tidak menyenangkan, dan kondisi traumatis. Dalam aspek psikologis, korban kasus kekerasan seksual oleh Bechi mendapat diagnosa dari psikolog forensik Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bahwa mereka mengalami Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), yang membuat mereka sering kali mengalami mimpi buruk berulang, kehilangan harapan hidup, bahkan beberapa kali ingin mengakhiri hidupnya.

Dalam keterbatasan pengetahuan dan pengalamannya, para korban berusaha untuk mengorganisasi diri dengan menginisiasi dan mengelola sebuah kolektif yang bernama Front Santri Melawan Kekerasan Seksual (FORMUJERES). Pembentukan kolektif ini dipicu oleh serangkaian kasus kekerasan seksual yang dialami dan diketahui oleh korban di pondok pesantren Shiddiqiyah dan ketidakberdayaan para korban untuk melawan. Selama para korban menempuh pendidikan, mereka tidak pernah dibekali pengetahuan soal hak asasi manusia dan berbagai perangkat pengetahuan untuk melawan berbagai ketidakadilan. Tujuan utama kolektif ini adalah membangun kekuatan santri yang terorganisasi untuk menghapus kekerasan seksual, terutama di kalangan santri, pelajar Islam di lingkungan Pesantren, dan di lembaga pendidikan pada umumnya di Indonesia. Kolektif ini juga bertujuan untuk menyebarkan kesadaran tentang kekerasan seksual, untuk mendorong perempuan muda dan pelajar untuk berjuang melawan kekerasan seksual dan jenis pelanggaran otoritas tubuh lainnya. Selain itu juga berupaya ingin membangun komunitas yang sehat di mana perempuan muda merasa nyaman dan diberi ruang aman untuk diri sendiri, bisa berekspresi, berkeaktifan, bertumbuh, serta mematahkan stigma dan diskriminasi seputar gender dan seksualitas.

Kasus kekerasan seksual di pesantren Shiddiqiyah ini menunjukkan fakta bahwa para korban benar-benar tidak berdaya, karena adanya kesenjangan relasi kuasa dalam hal ekonomi, sosial, dan politik yang sangat besar di antara mereka. Melalui kolektif ini, para korban bisa menemukan bahwa santri, khususnya santriwati dan para

pelajar, sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual di tengah hegemoni budaya feodalisme dan konservatisme yang mengakar di lingkungan pesantren. Melalui kolektif ini, para korban sadar bahwa dengan menguatkan diri satu sama lain, trauma mendalam yang dirasakannya akan bisa dipulihkan secara perlahan. Hal itu juga membuatnya tidak merasa sendirian sebagai korban yang mengalami penderitaan yang tidak berkesudahan. Melalui dukungan kolektif ini, para korban kasus kekerasan seksual di Shiddiqiyah saat ini sedang berusaha untuk pulih dan mencoba untuk memperbaiki kondisi hidupnya dengan mulai sekolah lagi. Dalam hal ekonomi, beberapa korban mulai berjualan es dan makanan kering, mengajar baca tulis untuk anak-anak, turut serta dalam pemberdayaan masyarakat di desa.

Dalam kolektif ini, beberapa korban yang sudah lebih pulih turut membantu para peneliti, mahasiswa, atau dosen untuk menjadi narasumber terkait kasus kekerasan seksual di pesantren Shiddiqiyah dan maupun di berbagai pesantren lainnya. Para korban juga membantu para korban kekerasan seksual lainnya di beberapa pesantren dengan turut bersolidaritas dan membantu advokasi. Para korban turut mendukung kampanye anti kekerasan seksual di media sosial, website, membuat diskusi, menerbitkan buku, dan membuat proyek film dokumenter. Beberapa korban saat ini juga sedang menulis sastra perlawanan terhadap kasus kekerasan seksual yang pernah dialaminya di pesantren sebagai upaya untuk menciptakan ruang aman bebas kekerasan seksual.

Para korban berpikir bahwa perjuangan yang sudah dilakukan adalah langkah awal. Langkah selanjutnya adalah bisa memperluas jejaring dan gerakan santri dalam isu kekerasan seksual. Hal ini penting untuk memaksimalkan dan mengembangkan kampanye serta gerakan perlawanan terhadap kekerasan seksual di lingkungan pendidikan Islam. Saat ini anggota kolektif front santri melawan kekerasan seksual ini tidak hanya santri di pulau Jawa saja, ada juga santri dari Nusa Tenggara Barat dengan pengalaman ketertindasan yang sama. Hal ini membuat kesadaran baru dalam kolektif bahwa pengalaman ketertindasan menjadi korban kekerasan seksual tidak hanya menyimpan banyak kesedihan dan trauma, tetapi juga menyimpan bentuk perjalanan hidup yang berharga yang bisa menjadi pelajaran bagi orang lain agar tidak mengalami bentuk penindasan yang sama. Besar harapan, gerakan santri lawan kekerasan seksual ini bisa menjadi lebih masif dan cita-cita menciptakan dunia baru tanpa kekerasan seksual di lembaga pendidikan Islam bisa tercapai.

Rekomendasi

1. Pemerintah diharapkan mengevaluasi berbagai proses pembelajaran yang ada di pesantren Shiddiqiyah dengan bekerja sama Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak, dan berbagai lembaga masyarakat supaya tidak ada kejadian kekerasan seksual yang berulang.
2. Pemerintah mendorong adanya implementasi program pelatihan untuk pengasuh pesantren dan santri mengenai hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan isu kekerasan seksual dan relasi kuasa yang tidak seimbang. Serta mendorong adanya kurikulum anti kekerasan pada anak.
3. Pemerintah meningkatkan program edukasi dan kesadaran di masyarakat tentang kekerasan seksual di pesantren untuk membuat Standard Operating Procedure (SOP) atau Prosedur Operasi Standar, dan menyediakan layanan psikologis yang lebih mudah diakses bagi korban.

Daftar Pustaka

- Masruroh, A., & dkk. (2021). *Atas nama baik pesantren: Kekerasan seksual dan keadilan yang harus ditegakkan*. Yogyakarta: Front Santri Melawan Kekerasan Seksual dan LKiS.
- Zakiah, L. (2015). Kepercayaan santri pada kiai. *Buletin Psikologi*, 12(1), 33–43. <https://doi.org/10.22146/bpsi.7467>
- Sadan, M. (2018). Pengarusutamaan gender dalam pendidikan pesantren: Kajian feminisme Islam. *Jurnal Harkat*:



Media Komunikasi Gender, 14(2), 97–109.

Sumintak, A.I. (2022). Analisis relasi kuasa Michel Foucault: Studi kasus fenomena kekerasan seksual di perguruan tinggi. *Jurnal Intelektualitas: Keislaman, Sosial, dan Sains*, 11.

Rahmanirwana, S., & Apsari, N. C. (2020). Sistem sosial patriarki sebagai akar dari kekerasan seksual terhadap perempuan. *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1).

Soehardiman, M.K. (2018). Studi fenomenologi resiliensi pada perempuan korban kekerasan seksual. *Psikohumaniora: Jurnal Penelitian Psikologi*, 3(1).

Alina dkk. (2024). Wawancara mendalam dengan penyintas kekerasan seksual di pesantren Shiddiqiyah.

